

International Media



Barito Pacific



HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGK

KAMIS 12 MARET 2020



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada tanggal 20 April, 2020.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Maret 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16:00 WIB. Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 12 Maret 2020
PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk
Direksi

kam ada, mari kita satukan. Anggarannya terserah, yang sana sudah punya terserah, di sini punya. Enggak usah saling ganggu anggaran kalau itu sensitif. Tapi bagaimana kalau kita bersatu. Termasuk bagaimana TNI-Polri masuk di situ," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pos lintas batas negara (PLBN) sebesar Rp24,3 triliun.

Mahfud meminta pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga mengintegrasikan pengelolaan anggaran itu. "Saya

informasikan, sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN itu besar sekali Rp24,3 triliun anggaran untuk empat hal ini. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan implementasinya kan itu hebat sekali," kata Mahfud dalam acara Rakornas Pengamanan Batas Negara, di Hotel Pull Man, Jakarta

menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin pengelolaan dana puluhan triliun itu dilakukan bersama-sama.

"Seminggu lalu, saya bersama Mendagri (Lito Karnavian) hadir rapat terbatas dengan presiden, apa pesan presiden? Diintegrasikan karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar akan wujud yang jadi barang bisa dilihat, jangan sendiri-sendiri. Coba diintegrasikan sehingga menjadi satu wujud di satu tempat program yang sama, itu," ujar Mahfud.

Mahfud pun menyoroti proses pembangunan PLBN selama ini yang dinilai belum terintegrasikan. Padahal anggaran yang digelontorkan cukup besar. "Itu dikeroyok, pelabuhan di sini, sentra perdagangannya di sini, pendidikan bikin sekolah-sekolah di sana, perindustrian di sana, bangun. Se-

patun anggaranunya besar," ucap Mahfud.

Dia mempersilakan kementerian dan lembaga mengatur anggaran mereka sendiri. Namun untuk urusan PLBN, dia meminta anggaran diintegrasikan. "Anggarannya anda atur sendirilah. Mau bagaimana, mau bagaimana, atur. Tetapi integrasikan di situ. Sehingga kami kemarin menyiapkan Inpres baru untuk Papua untuk menggantikan Inpres Nomor 9, itu sudah habis masa berlakunya," sebut Mahfud.

"Integrasikan, di situ kan semula kan ada di Bappenas ada, di Kemenko Polhukam ada, mari kita satukan. Anggarannya terserah, yang sana sudah punya terserah, di sini punya. Enggak usah saling ganggu anggaran kalau itu sensitif. Tapi bagaimana kalau kita bersatu. Termasuk

negara ini amatin gubernur daerah perbatasan. Had Kapolda dan Pangdam perbatasan, perwakilan dari menkom HAM, hingga per Kementerian.

"Kan kalau bahasa-LSM, bahasa gerakan sipil itu TNI-Polri itu yang bikin harus ditarik di sana, pelan HAM, ya enggak mungkin. Bagaimana sebuah negara TNI dan Polri dari situ, sebut Mahfud.

Mahfud menambahkan kehadiran TNI-Polri tetap diperlukan, namun aparat mengpendekatan yang humar pendekatan kesejahteraan tarik sehari saja sudah Ya (TNI-Polri) harus situ. Tinggal bagaimana itu manusiawi, lebih ke pendekatan kesejahteraan," ucap dia.